

Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia

RIDHA YAMIN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

SUTARYO

Universitas Sebelas Maret

Abstract: *Intern control system at the local government important to achieve effectiveness, efficiency, transparency and accountability in financial management. The effectiveness of the intern control system indicated by the number of findings in the BPK Audit Reports on Local Government Financial Report. BPK RI found that the number of weaknesses in the intern control system of local government in Indonesia is increasing every year.*

The purpose of this study is to provide empirical evidence related to the determinant of weaknesses intern control system in local government in Indonesia in terms of the number of work units, total population, the findings of the intern control system weaknesses previous year, e-Government ranking, and the level of completion of the follow-up on the results of audited.

Sample selection methods using purposive sampling method. This study uses multiple regression method to 385 districts/municipalities. The results indicated that the number of SKPD, total population, the findings of the intern control system weaknesses previous years, and the level of completion of the follow-up on the results of audited have significant effect on the intern control weaknesses. While the ranking of e-Government does not significant effect on intern control weaknesses.

Keywords: *the weakness of the system of intern control, local government, the number of SKPD, the total population, the findings of the intern control system weaknesses previous years, the rating of e-Government, the level of completion of the follow-up on the results of audite*

Abstrak: Sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas sistem pengendalian intern ditunjukkan dengan jumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI menemukan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah kabupaten/kota di Indonesia meningkat setiap tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait dengan faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia antara lain jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, pemeringkatan *e-Government*, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk 385 kabupaten / kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Sementara pemeringkatan *e-Government* tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Kata kunci: kelemahan sistem pengendalian intern, pemerintah daerah, jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, pemeringkatan *e-Government*, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

A. Pendahuluan

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara transparan sebagai bentuk hubungan keagenan. Pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelayanan kepada publik dan rakyat sebagai *principal*. Dalam konteks hubungan keagenan, individu akan bertindak sesuai kepentingan masing-masing sehingga muncul *agency conflict*. Konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi tersebut maka pemerintah daerah merancang suatu sistem pengendalian intern yang mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Salah satu kriteria pemberian opini adalah pemeriksaan atas efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan kelemahan SPI. Semakin banyak jumlah temuan menunjukkan semakin lemah sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Kelemahan sistem pengendalian intern terdiri atas kelemahan akuntansi pelaporan, kelemahan pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II BPK RI tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diketahui bahwa semakin meningkatnya jumlah temuan kelemahan SPI dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah di Indonesia. Temuan SPI LKPD Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada Gambar 1.

INSERT GAMBAR 1

Berdasarkan gambar di atas, peningkatan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern menjadi suatu masalah yang penting untuk diteliti. Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian intern telah banyak dilakukan namun pada umumnya hanya menggunakan karakteristik pemerintah daerah antara lain ukuran, jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kelemahan pengendalian intern (Kristanto, 2009; Martani dan Zaelani, 2011; Puspitasari, 2013; Hartono, 2014). Jumlah penduduk yang besar membuat tekanan dan pengawasan sehingga mendorong pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Martani dan Zaelani, 2011). Banyaknya jumlah sumber pendapatan membuat masalah pengendalian intern meningkat (Martani dan Zaelani, 2011; Putro, 2013). Tingkat pertumbuhan berhubungan positif dengan masalah pengendalian intern.

Pertumbuhan yang cepat menuntut penyesuaian dari atas pengendalian intern yang dimiliki sehingga memungkinkan terjadinya masalah-masalah pengendalian intern dalam organisasi (Doyle, Ge, dan McVay, 2007; Ashbaugh-skife, Collins, dan Kinney, 2007; Martani dan Zaelani, 2011).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggunakan komponen pengendalian intern dengan pendekatan COSO yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Intern BPK RI antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagai faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah di Indonesia.

B. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1994) didasari oleh asumsi bahwa individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam *agency theory* terdapat hubungan keagenan dalam bentuk kontraktual antara *principal* dan *agent* untuk melakukan pelayanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agent (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan adanya asimetri informasi yaitu perbedaan informasi antara *principal* dan *agent* sehingga menyebabkan distribusi informasi yang tidak sama antara keduanya (Fama dan Jensen, 1983).

Kondisi tersebut menyebabkan agen atau pemerintah daerah melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan pengawasan oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat *monitoring* untuk mengurangi *agency cost* (Adams, 1994). Selain itu,

audit menjadi salah satu bentuk dari *monitoring* yang dilakukan oleh pemilik untuk meminimalisir terjadinya *agency problem*. Pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil dikarenakan semakin berkurangnya asimetri informasi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pengendalian intern atas kinerjanya (Sudarsana *et. al.*, 2013).

2. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian sebagai aspek yang mendukung keberhasilan otonomi daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk ditingkatkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola secara efektif dan efisien. Arifianti (2013) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setyaningrum (2014) mengemukakan bahwa pengawasan mempengaruhi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Arens (2012) mengemukakan bahwa pengendalian intern adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, pimpinan untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian antara lain keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan tercapai.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang

berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Pemeriksaan merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada (Arifianti, 2013). Dalam pemeriksaan keuangan daerah, BPK RI melakukan pemeriksaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang mengacu pada lima komponen dalam Juknis Sistem Pengendalian Intern BPK RI meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu menyediakan informasi-informasi penting terkait kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan untuk mencapai tujuan entitas. SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya (Puspitasari, 2013). Pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar dan kompleks menyebabkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat (Setyaningrum, 2012).

b. Penilaian Risiko

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, faktor eksternal seperti jumlah penduduk perlu diidentifikasi oleh pemerintah daerah untuk menyediakan tingkat kebutuhan pelayanan umum. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah yang menjadi sorotan publik karena belum menampakkan

hasil yang baik, isu minimnya akuntabilitas, kesalahan pengelolaan sumber daya, kurangnya efisiensi dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintah. Hal tersebut diidentifikasi oleh pemerintah daerah sebagai risiko yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah agar *good governance* tidak hanya menjadi slogan pencitraan semata (Sulmiah, 2013).

c. Aktivitas Pengendalian

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebelumnya dapat membantu pemeriksa dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sistem pengendalian intern dan mengidentifikasi risiko pengendalian pada tahun laporan keuangan yang diperiksa. Temuan tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan tahun berikutnya selama masalah yang memunculkan modifikasi tersebut belum terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan kembali atau belum diungkapkan secara benar (Fatimah, 2014).

d. Informasi dan Komunikasi

Bentuk informasi dan komunikasi instansi pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik (*e-Government*). Tujuan *e-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. *E-Government* merujuk pada teknologi informasi di lembaga pemerintah yang bertujuan agar hubungan dalam tata pemerintahan (*governance*) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dapat lebih efisien, efektif, dan transparan (Hardjaloka, 2014). Beragam faktor turut mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-Government* antara lain kepemimpinan, sumber daya manusia dan kebijakan (Fitriansyah, 2013).

e. Pemantauan

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pemantauan tindak lanjut sebagai salah satu proses untuk menilai kualitas pengendalian intern dari waktu ke waktu (Hyde, 2011).

4. Pengembangan Hipotesis

1. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Banyaknya jumlah SKPD menyebabkan sulitnya implementasi sistem pengendalian intern sehingga jumlah SKPD mempengaruhi kelemahan pengendalian intern (Puspitasari, 2013). Kompleksitas transaksi akan menyebabkan kelemahan pengendalian intern yang tinggi (Gy dan My Vac, 2005). Pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD yang banyak memiliki jumlah kasus kelemahan pengendalian intern yang tinggi (Hartono, 2014). Birokrasi yang lebih kompleks terjadi pada pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar dan kompleksitas tersebut menyebabkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat (Setyaningrum, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁ : *Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah*

2. Jumlah Penduduk dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Penduduk berperan sebagai *stakeholders* bagi instansi pemerintah dalam mendorong transparansi sehingga pemerintah daerah didorong untuk memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Jumlah penduduk dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern karena jumlah penduduk yang besar membuat tekanan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah lebih besar. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk besar akan didorong melakukan pengungkapan yang lebih banyak sehingga pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian yang baik (Martani dan Zaelani, 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂ : *Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah*

3. Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Tahun Sebelumnya dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebelumnya dapat membantu pemeriksa dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sistem pengendalian intern tahun anggaran yang diperiksa. Aktivitas pengendalian memiliki proporsi tertinggi terhadap kelemahan sistem pengendalian intern karena memiliki proporsi kelemahan dalam kegiatan pengendalian dalam penelitian sebanyak 61% secara signifikan lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya (Boyle, 2004). Lemahnya sistem pengendalian intern tahun sebelumnya dapat menyebabkan salah saji pencatatan akuntansi tahun berikutnya baik pada penerapan SAP dan kepatuhan terhadap perundang-undangan (Mulyani dan Rindah, 2011). Temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan tahun berikutnya. Pemeriksa dapat mengacu pada laporan audit tahun sebelumnya untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa.

Pemeriksa dapat mempertimbangkan temuan audit yang signifikan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya (Fathimah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃ : *Temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah*

4. Pemeringkatan *e-Government* dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Informasi dan komunikasi melalui *e-Government* harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. *E-Government* sebagai sistem yang efektif atas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sehingga sistem pengendalian intern menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik (Armando, 2013). Semakin efektif sistem pengendalian intern maka nilai informasi laporan keuangan akan semakin baik maka semakin transparan pemerintah daerah. Kontak langsung dalam pemberian pelayanan memberi peluang yang besar terjadinya praktek maladministrasi (Holle, 2011). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan *e-Government* sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek maladministrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bingkai *electronic government* dalam pemberian pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₄ : *Pemeringkatan e-Government berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah*

5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui pemberian saran untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan serta melakukan pemantauan atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Kurangnya pelaksanaan tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut karena entitas belum memiliki kesamaan persepsi dan prosedur yang baku dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta ketidakpatuhan SKPD dalam melaksanakan TLHP sesuai instruksi kepala daerah. Tindak lanjut atas pemeriksaan keuangan disampaikan BPK RI agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian intern (Sari, 2013). Semakin besar persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan kelemahan SPI (Setyaningrum, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₅ : *Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah*

C. Metode Penelitian

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian meliputi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel adalah pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun 2012, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menyusun LKPD dan telah diaudit oleh BPK, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data jumlah penduduk, pemerintah

kabupaten/kota yang masuk dalam pemeringkatan *e-Government*, dan pemerintah kabupaten/kota yang terdapat dalam daftar rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2012. Adapun hasil pemilihan sampel dijelaskan dalam Tabel 1.

INSERT TABEL 1

2. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder (*secondary data*). Data sekunder tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011 dan 2012 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2012 dan 2013 yang diperoleh dari BPK RI, data jumlah penduduk kabupaten/kota tahun 2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan data pemeringkatan *e-Government* kabupaten/kota tahun 2012 yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SKPD, jumlah penduduk, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, pemeringkatan *e-Government*, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 2.

INSERT TABEL 2

4. Alat Analisis

Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda dengan formula sebagai berikut.

$$ICWt = b_0 + b_1SKPD + b_2LNPENDUDUK + b_3ICWt_1 + b_4PEGI + b_5TLHP + e$$

Keterangan:

ICW _t	=	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
b ₀	=	Konstanta
b ₁ , b ₂ ...b ₅	=	Koefisien regresi
SKPD	=	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi
LNPENDUDUK	=	Logaritma natural jumlah penduduk
ICW _{t-1}	=	Jumlah temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya
PEGI	=	Skor Peningkatan <i>e-Government</i> Indonesia (PeGI)
TLHP	=	Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
<i>e</i>	=	Koefisien <i>error</i>

D. Analisis Data dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi yang dimaksud meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.

INSERT TABEL 3

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian intern (ICW) memiliki nilai minimum sebesar 1 temuan dan nilai maksimum sebesar 18 temuan dengan nilai rata-rata sebesar 9,56 dan standar deviasi sebesar 3,12 maka penyebaran data pada rentang 6,44 sampai dengan 12,68. Hal tersebut menunjukkan masih banyak pemerintah daerah memiliki jumlah temuan diatas rata-rata. Variabel jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki nilai minimum sebesar 22 SKPD dan nilai maksimum sebesar 97 SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 49,02 dan standar deviasi sebesar 14,01 maka penyebaran data pada rentang 35,01 sampai dengan 63,03. Hal tersebut menunjukkan pada umumnya pemerintah daerah memiliki jumlah SKPD yang kompleks. Variabel tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 100% dengan nilai rata-rata sebesar 56,33 dan standar deviasi sebesar 22,59 maka penyebaran data pada rentang 33,74 sampai dengan

78,92. Hal tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih rendah yaitu sebesar 56,33% dibawah target penyelesaian tindak lanjut yang harus dicapai sampai dengan tahun 2012 yaitu diatas 60%.

2. Asumsi Klasik

Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, serta uji multikolinieritas dan semua dinyatakan terbebas dari masalah asumsi klasik dengan hasil yang disajikan pada Tabel 4.

INSERT TABEL 4

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z* untuk sampel penelitian 385 sebesar 0,941 dan probabilitasnya sebesar 0,338 yang nilainya lebih besar dari nilai signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) dalam tiap model regresi lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Hal ini berarti model-model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas atau seluruh variabel terjadi homokedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis data dengan menggunakan model regresi berganda dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 5.

INSERT TABEL 5

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen kelemahan sistem pengendalian intern sebesar 40,2% dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0,402. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa

sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai *F value* pada Tabel 5 sebesar 52,733 dengan signifikansi 0,000, artinya bahwa model regresi tersebut layak (*fit*) untuk digunakan dalam pengujian dan secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen.

Variabel jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 1% dan nilai koefisien sebesar 0.089 menunjukkan jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga **hipotesis pertama diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan Gy dan My Vac (2005) yang menemukan bahwa kompleksitas transaksi akan menyebabkan kelemahan pengendalian intern yang tinggi. Setyaningrum (2012) menemukan bahwa birokrasi yang lebih kompleks terjadi pada pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang besar dan kompleksitas tersebut menyebabkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat. Hartono (2014) menyatakan pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD yang banyak memiliki jumlah kasus kelemahan pengendalian intern yang tinggi karena menghadapi masalah mengenai pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang lebih besar memiliki kecenderungan kesulitan dalam implementasi sistem pengendalian intern.

Variabel jumlah penduduk dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 1% dan nilai koefisien sebesar -0,691 menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga **hipotesis kedua diterima**. Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa bahwa jumlah penduduk dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern karena penduduk mengambil peran dalam mendorong transparansi oleh pemerintah. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk besar akan didorong untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak sehingga pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pada dasarnya bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi harus tetap mengedepankan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik.

Variabel temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya dengan nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 1% dan nilai koefisien sebesar 0,276 menunjukkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga **hipotesis ketiga diterima**. Mulyani dan Rindah (2011) menyatakan lemahnya sistem pengendalian intern tahun sebelumnya dapat menyebabkan salah saji pencatatan akuntansi tahun berikutnya baik pada penerapan SAP dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Windiastuti (2013) menemukan tidak adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah berpotensi lemahnya sistem pengendalian intern tahun berikutnya. Fatimah (2014) menemukan bahwa temuan tahun sebelumnya memiliki keterkaitan dengan temuan tahun berikutnya selama masalah yang memunculkan modifikasi tersebut belum terpecahkan dan angka yang sesuai belum disajikan kembali atau belum diungkapkan secara benar.

Variabel pemerinkatan *e-Government* dengan nilai probabilitas 0,160 yang lebih besar dari tingkat kesalahan 5% menunjukkan hasil pemerinkatan *e-Government* tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga **hipotesis keempat ditolak**. Hasil yang tidak signifikan tersebut kemungkinan disebabkan PeGI sebagai model yang dibuat oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) tidak secara langsung menilai sistem yang efektif atas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan melainkan penilaian melalui lima dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan

perencanaan untuk mengukur tingkat keberhasilan tata kelola teknologi informasi. Selain itu, hasil pemeringkatan *e-Government* tahun 2012 menunjukkan bahwa implementasi *e-Government* pemerintah kabupaten/kota mengelompok pada kategori “Sangat Kurang”. Hal tersebut sesuai dengan temuan pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern tahun 2012 terkait penggunaan TIK yang menemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi belum optimal dalam mendukung penyusunan LKPD.

Variabel tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan nilai probabilitas 0,025 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%, nilai koefisien sebesar -0,013 menunjukkan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sehingga **hipotesis kelima diterima**. Hal tersebut sesuai dengan daftar rekapitulasi hasil pemantauan TLHP pemerintah daerah yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, bahwa sejak tahun 2008-2012 persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi hanya sebesar 54,21%. Sisanya sebanyak 45,79% masih belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut atau belum ditindaklanjuti. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK RI, target rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti diatas 60%. Rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kelemahan sistem pengendalian yang tinggi karena belum sepenuhnya berkomitmen melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh BPK RI. Secara garis besar, temuan pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian intern tahun 2012 terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih banyak temuan hasil pemeriksaan yang masih belum ditindaklanjuti karena beberapa faktor seperti kemauan dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan, pelanggaran atas kode etik, dan ketidakefektifan SPI belum memadai serta kelemahan dalam evaluasi pengendalian intern. Setyaningrum (2014) menemukan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap temuan audit. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut menyebabkan semakin banyak temuan yang menunjukkan lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

E. Penutup

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern, jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern, temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan pemerinkatan *e-Government* tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

2. Keterbatasan, Saran, dan Implikasi

Penelitian ini menggunakan data Pemerinkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) yang tidak dipublikasi secara umum. Penggunaan PeGI sebagai variabel komponen informasi dan komunikasi tidak secara langsung menilai sistem yang efektif atas pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Hal ini kemungkinan mengandung bias dalam ukuran variabel informasi dan komunikasi dalam menilai transparansi pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dapat menganalisis alat ukur yang tepat untuk komponen informasi dan komunikasi lainnya sehingga dapat memperoleh hasil yang signifikan seperti informasi terkait badan publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan yang secara langsung menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, metode pemerinkatan *e-Government* dapat

digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan teknologi informasi sehingga memungkinkan data tersebut digunakan dalam penelitian terkait audit tata kelola teknologi informasi.

Pemerintah daerah yang memiliki jumlah SKPD kompleks yang rentan akan kesalahan pencatatan/penghitungan dapat memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk meminimalisir pencatatan yang tidak akurat. Untuk menjawab tuntutan akuntabilitas masyarakat yang tinggi, pemerintah daerah harus transparan dalam penggunaan dana publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemerintah daerah harus menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan pihak BPK RI agar mendapatkan solusi dalam penyelesaian rekomendasi tindak lanjut.

Daftar Referensi

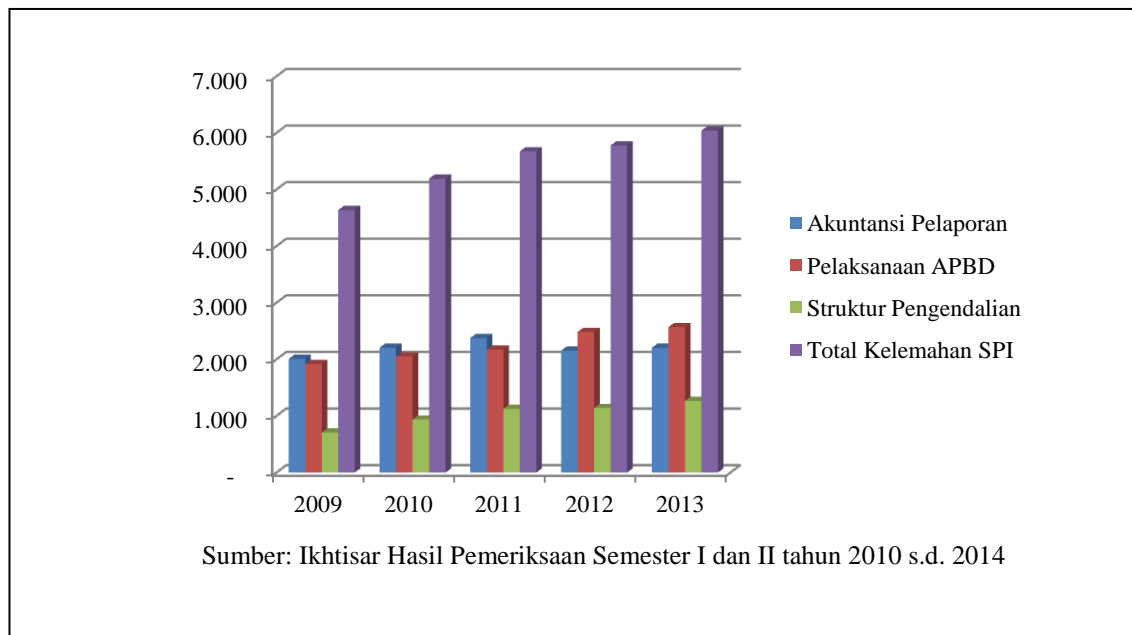
- Arens, A.A., R.J. Elder, dan M.S. Basley. 2012. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Arifianti, Hermin, Payamta, dan Sutaryo. 2013. *Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Armando, Gerry. 2013. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ashbaugh-Skaifea, Hollis, Daniel W. Collinsb, dan William R. Kinney. 2007. The discovery and reporting of intern control deficiencies prior to SOX-mandated audits. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 44: 166–192.
- Boyle, Edmund J., Steven M. Cooper, dan Marshall A. Geiger. 2004. An empirical analysis of intern control weaknesses under SAS No.78: An Examination of State Audit Reports. *Accounting Faculty Publications*. Paper 16.
- Doyle, Jeffrey, Weili Ge, dan Sarah McVay. 2007. Determinants of weaknesses in intern control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, pp.1-31.
- Holle, Erick S. 2011. Pelayanan publik melalui *electronic government*: upaya meminimalisir praktek maladministrasi dalam meningkatkan *public service*. *Jurnal Sasi*, 7 (3).
- Fatimah, Desi, Rian Nelly Sari, dan M. Rasull. 2014. Pengaruh sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya dan umur pemerintah daerah terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1) : 1-15.

- Fitriansyah, Ahmad, Hary Budiarto, dan Joko Santoso. 2013. Metode pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) untuk audit tata kelola teknologi informasi. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*.
- Gozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardjaloka, Loura. 2014. Studi penerapan *e-government* di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechtsvinding*, 3 (3) : 435-452.
- Hartono, Amir Mahmud, dan Nanik S.U. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram.
- Hyde, Julie Christine. 2011. "Material Weaknesses In Intern Control Over Compliance For Federal Grants To U.S. Counties". A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Memphis.
- Kristanto, Septian Bayu. 2009. Pengaruh ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah sebagai prediktor kelemahan pengendalian intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA, Volume 9, No.1*.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 1 (4) : 1-14
- Martani, dan Zaelani. 2011. *Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
- Mulyani, Pujianik, dan Rindah F.S. 2011. Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7 (2) : 102-116.
- Ojha, Shailendra, dan M.P. Gupta. 2010. A Model for Impact of E-Government on Corruption : Exploring Theoretical Foundations. *Journal of Critical Thinking in E-Governance*, pp.160-170.
- Puspitasari, Titus. 2013. "Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah". Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putro, Prima U.W. 2013. "Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sari, Diana. 2013. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. *Indonesian Journal of Economics and Business*, pp.116-124.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business*, 6e. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Setyaningrum, Dyah, Lindawati Gani, Dwi Martani, dan Cris Kuntadi. 2014. *Pengaruh kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap temuan audit dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai variabel intervening*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram.
- Sudarsana, H.S., Shiddiq N.R. 2013. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2 (4) : 1-13.
- Sulmiah. 2013. Otonomi daerah:kualitas pelayanan publik meningkat?. *Jurnal Birokrat Ilmu Administrasi Publik*, 1 (1) : 21-30.

- Windiastuti, Ruri. 2013. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Zaenal, Riski. 2013. "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*fraud*)". Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- _____. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- _____. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- _____. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/K/I-XIII.2/7/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan Keuangan BPK RI.

Lampiran

Gambar 1
Temuan SPI LKPD Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013



Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Pemerintah kabupaten/kota yang terdaftar pada tahun 2012	497
2	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak menyusun LKPD Tahun 2012 dan belum diaudit BPK	(7)
3	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki data jumlah penduduk tahun 2012	(0)
4	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak masuk dalam PeGI tahun 2012	(0)
5	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak terdapat dalam daftar rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2012	(0)
Jumlah sampel penelitian		490
Data outlier		(105)*
Jumlah sampel akhir penelitian		385

* *Residuals Casewise diagnostics-Outlier outside "2" standard deviations*

Tabel 2
Variabel Penelitian

No	Variabel	Jenis Variabel	Akronim	Definisi Operasional
1	Kelemahan SPI	Dependen	ICWt	Jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern
2	Jumlah SKPD	Independen	SKPD	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi
3	Jumlah Penduduk	Independen	LNPENDUDUK	Logaritma natural jumlah penduduk kabupaten/kota
4	Temuan SPI tahun sebelumnya	Independen	ICWt_1	Jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern tahun sebelumnya
5	Pemeringkatan <i>e-Government</i>	Independen	PEGI	Skor Pemeringkatan <i>e-Government</i>
6	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Independen	TLHP	Jumlah hasil pemantauan tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
ICWt	385	1.00	18.00	9.56	3.12
SKPD	385	22.00	97.00	49.02	14.01
LNPENDUDUK	385	8.76	15.42	12.58	1.04
ICWt_1	385	1.00	31.00	10.25	4.75
PEGI	385	0.00	3.00	0.48	0.83
TLHP	385	0.00	100.00	56.33	22.59

Keterangan:

ICWt = kelemahan sistem pengendalian intern, SKPD = satuan kerja perangkat daerah, LNPENDUDUK = logaritma natural jumlah penduduk, ICWt_1 = temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya, PEGI = pemeringkatan e-government, TLHP = tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Tabel 4
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji	N	K-S Z	Tolerance	VIF	Sig.
Normalitas	385	0.941			0.338
Heteroskedastisitas	385				
-SKPD					0.071
-LNPENDUDUK					0.274
-ICWt_1					0.849
-PEGI					0.093
-TLHP					0.713
Multikolinieritas	385				
-SKPD			0.890	1.124	
-LNPENDUDUK			0.747	1.339	
-ICWt_1			0.954	1.049	
-PEGI			0.962	1.039	
-TLHP			0.835	1.197	

Keterangan:

Dependen: ICWt = kelemahan SPI

SKPD = satuan kerja perangkat daerah, LNPENDUDUK = logaritma natural jumlah penduduk, ICWt_1 = temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya, PEGI = pemeringkatan e-government, TLHP = tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; N = jumlah sampel; K-S Z = Kolmogorov-Smirnov Z; VIF = Variance Inflation Factor

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda

	Expt Sign	B	t-value	Sig.
Constant		11.708	7.381	0.000 ^a
SKPD	+	0.089	9.588	0.000 ^a
LNPENDUDUK	-	-0.691	-5.081	0.000 ^a
ICWt_1	+	0.276	10.387	0.000 ^a
PEGI	-	0.212	1.408	0.160
TLHP	-	-0.013	-2.243	0.025 ^b
R ²		0.410		
Adj. R ²		0.402		
F-value			52.733	
Asymp sig.				0.000 ^a

Keterangan:

Dependen: ICWt = kelemahan SPI

SKPD = satuan kerja perangkat daerah, LNPENDUDUK = logaritma natural jumlah penduduk, ICWt_1 = temuan kelemahan SPI tahun sebelumnya, PEGI = pemeringkatan e-government, TLHP = tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

^asignifikan pada level 1%

^bsignifikan pada level 5%